

**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKIP ) TAHUN 2021**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA**

**PALANGKA RAYA  
2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allag SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kami telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021.

Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun 2021, harus dilakukan Evaluasi Tingkat Capaian Keberhasilannya.

Capaian Keberhasilan / Kinerja yang terakreditasi melalui penilaian dengan standar yang telah ditetapkan sebagai pembandingan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya disesuaikan sebagai suatu upaya dalam pemenuhan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran Visi dan Misi Instansi Pemerintah dalam kerangka perwujudan Good Governance.

Menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga kritik, saran dan pemikiran yang sifatnya membangun sangatlah diperlukan dimasa-masa datang.

Sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama segenap rekan-rekan pejabat/staf pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas bantuan dan kerja kerasnya dalam pelaksanaan Tugas selama Tahun 2021 ini.

Palangka Raya, Maret 2022  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA

Ir. JANUMINRO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198903 1 009

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.4 Aspek Strategis Organisasi .....	4
1.5 Permasalahan Umum .....	5
1.6 Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Rencana Strategis .....	7
2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis .....	8
2.3 Kebijakan dan Program .....	9
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	10
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021.....</b>	<b>11</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	12
3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 .....	14
3.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah .....	15
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2021 .....	17
3.5. Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya.....	17
3.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	18
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	19
<b>BAB. IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis .....	21
<b>Lampiran .....</b>	<b>22</b>
Capaian realisasi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021	
Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Fakta Kota Integritas dan Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Individu	
Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	
Notulen Rapat.	



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mengacu dari Visi dan Misi serta Rencana Strategis sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Aspek Strategis yang ingin dicapai dalam bidang Pembangunan Politik adalah berupa Kebijakan Politik Pemerintah Kota Palangka Raya dengan capaian kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan, berkaitan dengan kondisi Sosial Ekonomi, Kultural, sehingga berbagai Gejolak Sosial semakin berkurang dan Sinergisme Komunikasi Sosial serta Komunikasi Politik dalam rangka menunjang Pembangunan menjadi semakin ditingkatkan. Hal tersebut sesuai dengan penjabaran Program Departemen Dalam Negeri cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari hasil Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan, secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya dapat dikategorikan cukup baik, namun harus dilakoni bahwa masih banyak sasaran yang belum tersentuh capaian target yang diinginkan dalam tahun 2021 dan sebagai langkah perencanaan strategis tahun berikutnya.

Demikian pula Capaian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik yang bersumber dari APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021 secara umum telah berhasil dilaksanakan dengan Kategori Capaian Cukup Baik karena dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target kegiatan seperti yang direncanakan.

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam Good Governance dituntut adanya sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimatif sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palangka Raya yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023. Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja Tahun 2021.
2. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 adalah :

1. Mewujudkan pertanggungjawaban kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
3. Terlaksananya program dan kegiatan secara efisien, efektif, dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan.

## **1.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

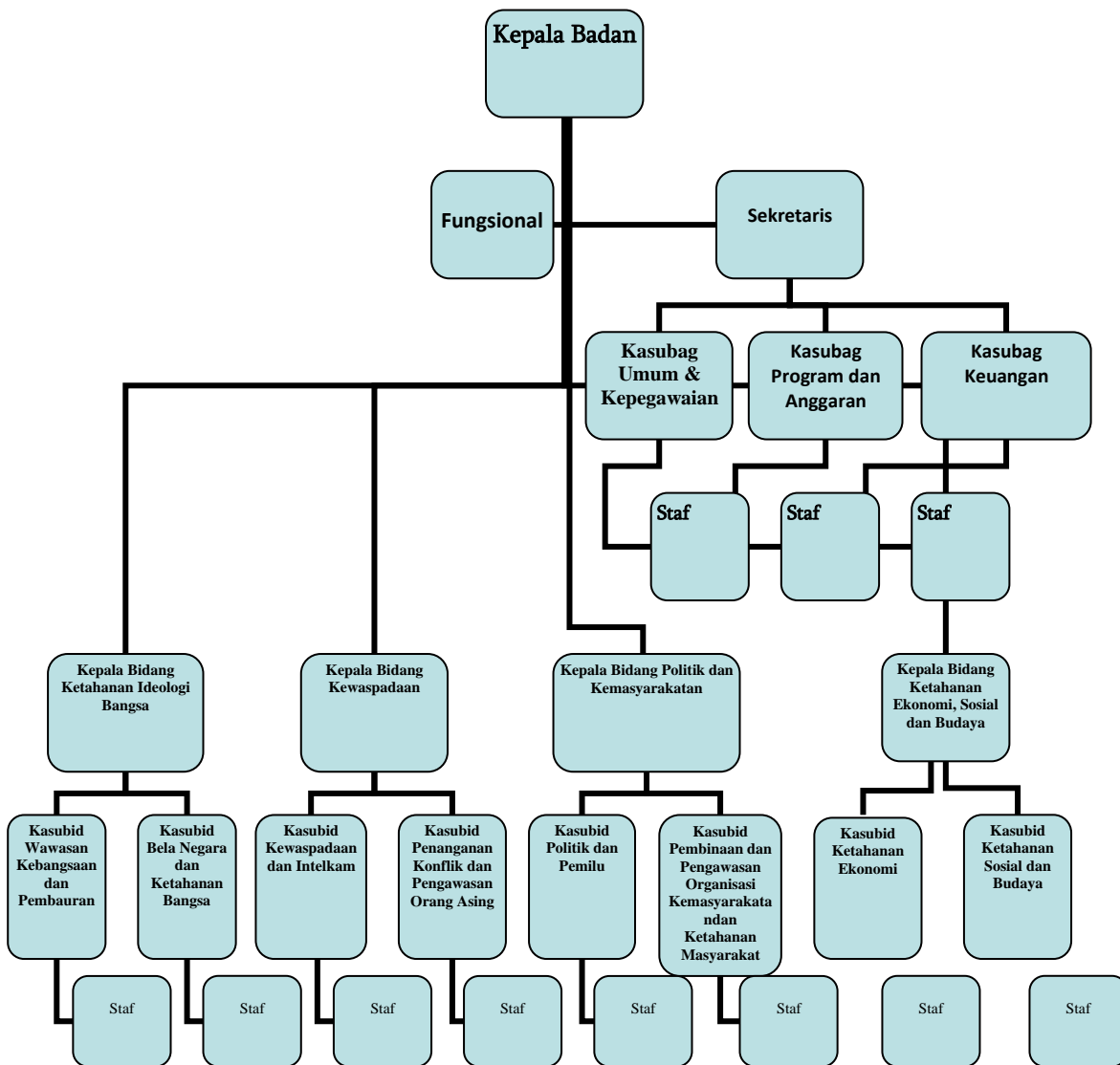
Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Kota Palangka Raya yaitu pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Untuk mengaktualitas tugas pokok dan fungsinya tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai struktur organisasi seperti di tunjuk pada gambar 1.1 pada halaman berikut .



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kota Palangka Raya**

#### **1.4. Aspek Strategis Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai Tugas Pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping pengaruh-pengaruh positif, kondisi ini juga membawa pengaruh negatif yang berdampak pada peningkatan potensi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan terhadap ideologi dan semangat kebangsaan serta dalam menciptakan konditivitas daerah dan tingginya intensitas gangguan kamtibmas. Potensi tersebut antara lain dalam bentuk degradasi semangat kebangsaan dan bela negara, peningkatan konflik sosial, dan maraknya paham sarat kelompok radikal.

Kondisi-kondisi ini dapat berpotensi mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan serta cinta tanah air, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait dan melalui peran serta semua elemen masyarakat. Dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia juga cukup pesat yang ditunjukkan antara lain dengan diterapkannya sistem multi partai dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perkembangan ini menuntut kecerdasan politik masyarakat dan kesiapan Partai Politik sebagai salah satu unsur utama dalam infrastruktur politik. Namun aktualitas Partai Politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya berlangsung dengan optimal karena sebagai kondisi internal Partai Politik maupun perkembangan kondisi eksternal.

Kaderisasi Partai Politik yang belum berjalan dengan baik serta kecenderungan Partai Politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok elite-elitanya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap Partai Politik. Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya dan dukungan dengan mendorong dan memfasilitasi Partai Politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitas dan pemberian dukungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



### **1.5 Permasalahan Utama (*Strategic issued*)**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

- (1) Mutasi atau promosi pada staf dan pejabat tidak sesuai dengan keadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sehingga masih ada pegawai yang rangkap tupoksi.
- (2) Anggaran yang diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, khususnya menyangkut belanja langsung seperti kegiatan Pelaksanaan Pemilu yang kurang memadai dalam pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pemilu.
- (3) Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dalam politik ;
- (4) Masih kurangnya komunikasi antar Organisasi Politik, Ormas dan Pemuda.
- (5) Menurunnya nilai - nilai luhur budaya bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (6) Fasilitasi pendirian tempat ibadah masih diperlukan karena masyarakat banyak yang kurang paham.
- (7) Pengawasan terhadap orang asing masih lemah.
- (8) Reformasi tentang deteksi dini masih kurang sarana dan prasarana.
- (9) Kesadaran masyarakat masih kurang terutama menyangkut keamanan dan ketertiban.
- (10) Kurangnya informasi yang cepat dan akurat tentang kondisi ekonomi masyarakat.

## **1.6 Sistematika Penyajian.**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.4 Aspek Strategi Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA.**

- 2.1 Rencana Strategis 2018 - 2023
- 2.2 Tujuan/ Sasaran Strategis
- 2.3 Kebijakan dan Program
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

- 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
- 3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2021 dengan tahun 2020 dan Tahun Terakhir
- 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis
- 3.4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- 3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

### **BAB IV P E N U T U P**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA.

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS 2018 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2018 – 2023 antara lain :

- a) Meningkatkan pendidikan politik masyarakat di Kota Palangka Raya yang mayoritas masih rendah yang berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
- b) Kondisi geografis di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya, seperti daerah terpencil dan daerah pinggiran sungai, yang bisa menghambat akses Pemerintah Daerah untuk memantau kegiatan masyarakat yang berpotensi membahayakan kondisi kesatuan bangsa dan politik masyarakat.
- c) Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (distrust) pada proses hukum.
- d) Regulasi politik yang sering berubah dan proses politik, khususnya pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang terlalu sering kuantitasnya sehingga menimbulkan kejenuhan serta ketidakpastian di masyarakat.

#### 1. PERNYATAAN VISI.

- a. Bahwa tantangan masa depan yang semakin kompleks yang diwarnai dengan berbagai perubahan dinamis sebagai konsekuensi dari demokratisasi perlu senantiasa diantisipasi secara terus menerus dengan mengembangkan berbagai peluang dan inovasi politik.
- b. Visi yang dirumuskan adalah sebagai aspek strategis dalam mengarahkan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya jauh kedepan pada apa yang ingin dicapai Pemerintah.
- c. Rumusan Visi Kota Palangka Raya adalah **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua”**

#### 2. PERNYATAAN MISI.

Komitmen yang telah disepakati merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Visi Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan dirumuskan dalam Misi dengan ditetapkannya Misi Organisasi diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil dan pihak-pihak berkepentingan lainnya hendaknya dapat mengetahui dengan jelas Peran dan Program Kerja serta hasil yang ingin dicapai Organisasi.

Adapun Misi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya adalah masuk kedalam misi 2 dari RPJMD yaitu **“Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Smart Society (Masyarakat cerdas)”**

Untuk melaksanakan Misi tersebut dibuat program kerja meliputi :

- a. Memanfaatkan iklim kondusif, sosial / Politik masyarakat secara bijaksana untuk partisipasi pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan.
- c. Menyelenggarakan Koordinasi.
- d. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat sekitar Kesatuan Bangsa, Integrasi Kebangsaan.
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional.

## **2.2 TUJUAN / SASARAN STRATEGIS.**

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses Perencanaan Strategis Organisasi dari Tahun ketahun Anggaran berikutnya sejalan dengan rumusan untuk masing-masing tujuan yang ingin di capai dalam Tahun Anggaran bersangkutan.

### a. Tujuan

#### 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Selain itu arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi pelaksanaan padan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi kegiatan.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan masukkan dalam menentukan kebijakan anggaran dan penyusunan program kegiatan tingkat Kota Palangka Raya.

b. Sasaran Strategis

Ada beberapa sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kualitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2018 – 2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kerukunan elemen masyarakat	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Indeks toleransi	10

### 2.3 Kebijakan dan Program

a. Kebijakan

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan Penguatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
2. Tercapainya stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat

b. Program

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 yaitu :

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 antara lain ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021-2023 antara lain ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik Sosial

#### **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberi *reward* atau penghargaan atau sanksi. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Penetapan Kinerja Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	1.	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	40
		2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	40
		3.	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	30
		4.	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	96%
		5.	Tingkat partisipasi pemilih	-
		6.	Indeks Toleransi	10
		7.	Prevalansi Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	0.50%

### BAB.III

## AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau direncanakan merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja.

Pada tahun 2021 telah ditetapkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021. dalam penetapan kinerja tersebut juga ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk mencapai kinerja dimaksud, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 merupakan tolok ukur keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 berdasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang telah di tentukan dalam penetapan kinerja Tahun 2020.

Capaian kinerja pada setiap sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021	Realisasi	Capaian
				2021	2021
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	40	4	10%
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	40	28	70%
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	25	4	16%
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	96%	85%	89%
		Tingkat partisipasi pemilih	-	-	-
		Indeks Toleransi	10	0	0
		Prevalansi Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	0.50%	0%	0%



Dari Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dapat di simpulkan bahwa realisasi pada masing-masing indicator masih ada yang mebul mencapai target hal ini di sebabkan oleh :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya tahun 2021 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan indikator program yang targetnya terlalu tinggi dan juga adanya pengurangan anggaran serta adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak karena pandemic Covid-19, sehingga realisasinya belum bisa dicapai.
- b.Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan tahun 2021 hampir memenuhi target, hal ini dikarenakan banyaknya Ormas, LSM, Yayasan yang melaporkan kembali keberadaanya.
- c.Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama tahun 2021 belum memenuhi target, hal ini dikarenakan target indikator yang terlalu tinggi dan adanya pembatasan pertemuan dengan mengumpulkan orang banyak, karena Pandemic Covid-19 serta refocusing anggaran.
- d.Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan tahun 2021 belum mencapai target, hal ini dikarenakan adanya refokusing anggaran tetapi tidak mengurangi proaktifnya penyampaian laporan dalam hal Rencana Aksi Daerah (RAD) Penangan Konflik Sosial di Masyarakat baik ke pemerintah daerah/provinsi maupun ke pemerintah pusat.
- e.Tingkat Partisipasi Pemilih tahun 2021 tidak ada target di karenakan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum
- f. Indeks Toleransi Tahun 2021 telah masih belum memenuhi target, hal ini dikarenakan hasil penilaian dari Setara Institute untuk kota Palangka Raya masih belum di sampaikan, dikarenakan hasilnya akan di sampaikan pada Tahun 2022
- g.Prevalansi penurunan pelnyalahgunaan narkoba untuk tahun 2021 masih belum realisasi di karenakan masih belum ada fress realase

### **3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir**

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indicator sasaran yang telah di tetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	0	4	11	4	10
Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	0	0	18	60	28	70
Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	0	0	10	10	4	16
Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	0	0	99%	94	85	89
Tingkat partisipasi pemilih	0	0	77.5%	62.83	0	0
Indeks Toleransi	0	0	14	43	0	0
Prevalansi Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2020 pada tabel 3.2 Realisasi Kinerja, dari semua indikator ada beberapa yang belum mencapai target yang terpenuhi dikarenakan adanya pengurangan anggaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di sebabkan untuk penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya yang beberpa waktu yang lalu sempat melonjat drastis.

Sedangkan pada Tahun 2021, berdasarkan tabel 3.2 Realisasi Kinerja, dari 7 (Tujuh) indikator kinerja, 2 (dua) indikator yang hamper mencapai target dengan pencapaian 70-80%, dan sedangkan yang lainnya  $\leq 50\%$ .

### 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	40	4	10
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	40	28	70
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	25	4	16
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	96%	85%	89
		Tingkat partisipasi pemilih	-	-	-
		Indeks Toleransi	10	0	0
		Prevalansi Penurunan Penyalahgunaan Narkoba	0.50%	0	0

Berdasarkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya tahun 2021 berdasarkan tabel 3.3 Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu :

- a. Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah kota Palangka Raya untuk target RPJMD yaitu 40 tetapi untuk realisasi tahun 2021 berjumlah 4 kegiatan atau 10% dari target.
- b. Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan untuk target RPJMD yaitu 40 tetapi untuk realisasi tahun 2021 berjumlah 28 surat atau 70% dari target.
- c. Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama untuk target RPJMD yaitu 25 tetapi untuk realisasi tahun 2021 berjumlah 4 kegiatan atau 16% dari target.
- d. Persentase Capaian Kinerja Pencegahan, Pemulihan untuk target RPJMD yaitu 96% tetapi untuk realisasi tahun 2021 berjumlah 85% dari target.
- e. Tingkat Partisipasi Pemilih untuk target RPJMD yaitu 0% tetapi untuk realisasi tahun 2021 berjumlah 0% dikarenakan tidak ada pelaksanaan Pemilihan Umum
- f. Indeks Toleransi untuk target RPJMD yaitu Peringkat 10 tetapi untuk realisasi tahun 2020 Kota Palangka Raya menduduki peringkat 14 besar, sedangkan untuk tahun 2021 masih belum Fress Realase hasil dari Setara Institut.

g. Prevalansi Penurunan Penyalahgunaan Narkoba untuk realisasi Tahun 2020 data BNN prevelensi Provinsi Kalteng mengalami penurunan sekitar 1,98 persen atau dari peringkat ke 5 nasional, dan untuk tahun 2021 masih belum ada Fress Realase.

### **3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Tahun 2021**

Analisis penyebab kurangnya pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2021 berdasarkan tabel 3.1 Realisasi Kinerja yaitu karena adanya pengurangan anggaran dan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 yang sempat melonjat pada beberapa waktu yang lalu, sehingga semua kegiatan dan pertemuan di kurangi untuk berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang sudah disusun, baik melalui media cetak maupun melewati website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya serta laporan yang telah disampaikan tepat waktu. Sedangkan untuk kegagalan kinerja tahun 2021 disebabkan oleh efisiensi dan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut pada tahun selanjutnya yaitu dengan mengevaluasi kembali target pada indikator kinerja pada saat perubahan RPJMD dan Renstra menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

### **3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Jika di lihat dari pagu dana yang diberikan Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tiap tahun anggaran akan didapati kenaikan dan penurunan anggaran baik itu Belanja Operasi untuk menopang kinerja sebagaimana tabel di bawah ini .

No	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2021
1	6.406.712.635,13	8.403.578.704

Dengan jumlah 25 orang ASN dan 8 orang PTT yang 30 % latar belakang disiplin ilmunya yang berbeda-beda, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pimpinan dimana penempatan personil yang mengampu tugas pokok dan fungsi yang berhubungan langsung dengan pemenuhan indikator utama harus benar-benar diperhitungkan. Namun dengan penurunan anggaran yang diberikan tidak membuat kinerja ASN Badan Kesatuan dan Politik Kota Palangka Raya menurun. Dengan demikian penambahan dan pengurangan anggaran tidak serta merta membuat kondisi menjadi buruk, namun sebaliknya ada kecenderungan peningkatan atas kinerja.

### 3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Pencapaian keberhasilan kinerja sasaran di atas didukung oleh pencapaian program yang mendukung pencapaian sasaran antara lain:

**3.6 Tabel Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Program	Indikator program	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	40	4	10%
		Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	40	28	70%
		Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	25	4	16%
		Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	96%	85%	89%
		Tingkat partisipasi pemilih	-	0%	0%
		Indeks toleransi	10	0	0%
		Prevalansi penurunan penyalahgunaan narkoba	0.50%	0	0%

Program ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai sasaran meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat pada tahun 2021 dibebani anggaran sebesar Rp. 8.403.578.704 dengan realisasi Rp. 7.961.947.270 (94,74%).

Program ini didukung oleh 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dimana masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan kegiatan dimaksud dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Palangka Raya. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari sekretariat yang mengampu Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran, sebagai urat nadi administrasi secara umum yang menyokong sarana dan prasarana kerja pada masing-masing bidang yang mendukung terpenuhinya indikator program utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

### 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya memperoleh total anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya sebesar Rp. 8.403.578.704.- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 8.212.737.860.- dan Belanja Modal Rp. 190.840.844 Realisasi penggunaan anggaran tersebut di tunjukan pada Tabel 3.6 dan 3.7

**Tabel. 3.7**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.435.563.184	4.117.080.831	93
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	552.879.156	547.397.980	99,01
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.195.804.801	1.194.225.808	99,87
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	308.900.000	307.275.000	99,47
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	339.953.750	328.639.750	96,67
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan Konflik Sosial	1.570.477.813	1.467.327.900	99,45
<b>JUMLAH</b>		<b>8.403.578.704</b>	<b>7.961.947.270</b>	<b>94,74</b>

**Tabel. 3.8**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2021**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasional	8.403.578.704	7.961.947.270	94,74

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mendapat alokasi anggaran dari APBD Kota Palangka Raya sebesar Rp. 8.403.578.704 yang terdiri dari belanja Belanja Operasi sebesar Rp. 8.212.737.860 dan belanja Modal sebesar Rp. 190.840.844. Penyerapan anggaran tersebut adalah masing-masing Rp. 4.117.080.831 atau 93% untuk belanja Operasional dan Belanja Modal Rp. 187.219.388 atau 98% untuk belanja langsung. Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp. 7.961.947.270 atau 94,74 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung termasuk sangat baik.

Keseluruhan pencapaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya secara umum telah berhasil menyelenggarakan program dan kegiatan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021. Selain itu, rancangan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis**

Hasil akuntabilitas kinerja pada Bab III menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya pada Tahun 2021, yang di ukur melalui pencapaian target indikator kinerja.

Dari luasan lokasi yang seyogyanya menjadi jangkauan Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya sesuai Visi dan Misi yang diemban dalam Tahun Anggaran 2021 baru sebagian Sasaran Strategis yang memenuhi target Capaian Kinerja. Hal ini terjadi kendala antara lain sebagai berikut :

1. Dana untuk beberapa komponen dari properti yang diusulkan semula.
2. Masih banyak berbagai kalangan yang kurang memahami pentingnya eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya dari sisi Pembangunan Kesatuan Bangsa, Integrasi Bangsa dan Pembangunan Pgram yang disetujui tidak sesuai seolitik.
3. Sumber Daya Manusia sebagai pendukung Pencapaian Kinerja masih perlu peningkatan kualitas dan keterampilan manajerial yang tinggi dibidangnya, disamping juga kualitas sesuai keperluan.
4. Peralatan pendukung yang tidak kurang pentingnya adalah Peralatan Administrasi dan Sarana Mobilitas untuk memungkinkan kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan.

Dalam perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023. Target capaian indikator keberhasilan setiap sasaran telah didesain untuk meningkat setiap tahunnya. Memperhatikan target sasaran tersebut dan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya, maka perlu direncanakan dan dirumuskan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan efektif yang mengarah kepada pencapaian target dan sasaran.



Selain itu, kegiatan antar bidang seharusnya bersinergi dan saling mendukung, sehingga pencapaian target dan sasaran akan lebih optimal. Pada aspek pelaksanaan, setiap kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan.

Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat menjadi tolok ukur bagi Pelaksanaan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya yang lebih baik ditahun mendatang.

Disadari bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini tidak terlepas dari Kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu sekali lagi diperlukan kritik membangun dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Lampiran : Capaian Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2021.

No	KEGIATAN/URAIAN BELANJA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
A. BELANJA OPERASIONAL				
1	Belanja Pegawai	2.995.245.043	2.689.814.182	97.00%
BELANJA BARANG DAN JASA				
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	88.012.556	87.666.700	99.61
2.	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	26.000.000	22.345.000	85.94
3.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.994.375	9.994.000	100
4.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.000.000	66.975.000	99.96
5.	Penyediaan bahan logistik kantor	21.180.000	21.180.000	100
6.	Penyelenggaraan barang cetakan dan penggandaan	42.799.688	202.016.815	100
7.	Pengadaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.127.188	13.127.100	98.74
8.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	453.172.000	453.122.000	99.99
9.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	457.717.440	432.757.698	94.16
10.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	120.064.050	114.137.650	94.55
11.	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	70.000.000	70.000.000	100
12.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	19.570.000	19.570.000	100
B. BELANJA OPERASIONAL				
B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	552.879.156	547.397.980	99.01
B. BELANJA OPERASIONAL C. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL				
1.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1.293.525.000	1.293.525.000	100
2	Kegiatan terpadu pencegahan konflik soSial di wilayah kota Palangka Raya	164.328.150	164.078.150	99.85
3	Kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota palangka Raya	58.259.800	58.259.800	99.85
B. BELANJA LANGSUNG D. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.195.804.801	1.194.225.808	99.87
B. BELANJA OPERASIONAL E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT				
1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	308.900.000	307.275.000	99.47
B. BELANJA OPERASIONAL F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	339.953.750	328.639.750	96.67
B. BELANJA OPERASIONAL G. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang	72.230.938	71.830.100	99.45

	Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.498.246.875	1.395.497.800	93.14
B. BELANJA LANGSUNG H. BELANJA MODAL				
1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	127.423.969	123.802.513	99.99
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	63.416.875	63.416.875	100
JUMLAH BELANJA DAERAH		8.403.578.704	7.961.947.270	94.74